

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BM, H Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, cetakan pertama*. Bandung: Alumni
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo
- , 2011. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafik.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana
- , 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, cetakan pertama*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Is, Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Kamil, Iskandar. 2003. *Kode Etik Profesi Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kuffal, HMA. 2005. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press
- Manan, Bagir. 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masriani, Yulies Tiena. 2009 *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika

Metokusumo, Sudikno. 2005. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak Tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muchsin. 2006. *Ikhtisan Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada

-----2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

-----2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju

-----2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

-----2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nazir, Moch. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia.

P, Didik Endro. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

R, Moch Choirul. 2021. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: LSHP

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

-----2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Samosir, C. Djisman. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia

Sinaga, Dahlan. 2017. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara*. Bandung: Penerbit Nusa Media

Surachmin, Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika

Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Grasindo

Witanto, Damoko Yuti, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebua Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Jurnal

Adonara, Firman Floranta, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2

Alam, Sumarni, 2017, Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek di Indonesia, *Skripsi*, Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang

Amdani, Yusi, 2015, Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3

- Bahreisy, Budi, 2018, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2
- Cahyadi, I Made, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Minggu Widyantara, 2020, Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1
- Devinta, Agnes Asisi Marselle dan G. Aryadi, 2015, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Pidana Korupsi, *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta, 2016, Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Irfani, 2017, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al'Adl*, Vol. 9 No. 3
- Listiyanto, April, 2017, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana, *Jurnal Rechtsvinding*
- Muliawan, Anatomi, dan Carli Caniago, 2010, Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 7 No. 2
- Munthe, Indra Kumalasari, 2018, Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 2 No. 17
- Nugroho, 2009, Pidana Tutupan Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Gloria Juris*, Vol. 9 No. 1
- P, Sapto Handoyo D., 2018, Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pidana di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 4 No. 1
- Permana, Deo Erdiansyah, 2011, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana dalam Gabungan Tindak Pidana, *Skripsi*, Jember: Universitas Jember
- Raharsi, Raden Rara Rahayu Nur, Supanto, dan Muhammad Rustamaji, 2019, Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Santoso, Listiyono, Dewi Meyriswati, dan Ilham Nur Alfian, 2014, Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 4 No. 27

Setiyono, Budi, 2017, Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus, *Politika Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 8

Setyanegara, Ery, 2013, Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”)

Soejadi, 2003, Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasi di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Taher, Olivia, 2018, Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Mengandung Pidanaan Berdasarkan Pasal 193 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 2

Timbuleng, Alexandra, E.J, 2020, Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2

4. Internet

Bachtiarudi Alam, Penjelasan Mahkamah Agung soal Vonis Nihil, tersedia di website <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-mahkamah-agung-soal-vonis-nihil.html>, diakses tanggal 15 Juni 2022

HukumOnline, Memahami Istilah Vonis Nihil dalam Perkara Pidana, Tersedia di website <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/?page=3> diakses pada tanggal 25 Februari 2022

Tim detikcom, Siapa Heru Hidayat yang Lolos dari Hukuman Mati di Skandal ASABRI, tersedia di website <https://news.detik.com/berita/d-5904691/siapa-heru-hidayat-yang-lolos-dari-hukuman-mati-di-skandal-asabri/2>, diakses tanggal 16 Februari 2022

Zhamrawut Corps Indonesia, Vonis Nihil, tersedia di website <https://kamushukum.web.id/arti-kata/vonis-nihil/>, diakses tanggal 15 Juni 2022